

## ANALISIS DAMPAK PEMEKARAN WILAYAH DALAM PERSPEKTIF OTONOMI DAERAH (Suatu Tinjauan Empirik di Kabupaten Bengkulu Tengah)

Oleh:

Adi Sutojo<sup>1</sup>

### ABSTRAKSI

Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, yang merupakan koreksi atas penyelenggaraan otonomi daerah selama periode 1999-2004, meskipun ada daerah pemekaran baru yang berhasil, rupanya lebih banyak daerah baru yang kurang berhasil. Sementara dalam praktek ketatanegaraan ide Pemekaran Wilayah, pada dasarnya merupakan respon dari perubahan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia pasca reformasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, dimana dalam pengumpulan data dengan menggunakan data sekunder berupa studi dokumentasi yang bersumber dari data BPS dari tahun 2012 s.d. tahun 2014. Adapun teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis deskriptif, dimana analisis yang dilakukan untuk dapat menjelaskan kondisi perkembangan yang terjadi di Kabupaten Bengkulu Tengah berdasarkan aspek-aspek yang telah ditentukan. Berdasarkan hasil penelitian, dapat diketahui bahwa pada pertumbuhan ekonomi, terjadi pertumbuhan yang belum terlalu signifikan pada Kabupaten Bengkulu Tengah sebagai daerah otonom, sehingga dampak pemekaran yang terjadi belum dapat diukur dengan pasti. Sedangkan untuk pelayanan publik, pasca pemekaran wilayah Kabupaten Bengkulu Tengah mengalami peningkatan pelayanan publik yang cukup pesat. Perhatian pemerintah terhadap pelayanan publik ini pun juga besar. Kinerja keuangan Kabupaten Bengkulu Tengah pasca pemekaran juga sangat baik, hal ini dilihat dari pengelolaan penerimaan maupun belanja daerah. Penerimaan daerah meningkat sangat pesat, hal ini menunjukkan efektifitas kinerja keuangan daerah dalam mengelola potensi yang dimilikinya sangat baik.

**Kata Kunci:** *Dampak pemekaran, Pertumbuhan ekonomi, Pelayanan publik dan Kinerja keuangan daerah*

#### A. Pendahuluan

Otonomi daerah telah memberikan warna baru di dalam pengelolaan daerah, sehingga saat ini membuka peluang persaingan antar daerah untuk mengelola sendiri potensi daerah yang dimilikinya.

Amanat UUD 1945 yang tertuang di dalam Pasal 18B ayat (1) menyebutkan bahwa “Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang”. Selanjutnya pada ayat (2) menyebutkan “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya, sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan

masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagaimana diatur dalam undang-undang”.

Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, yang merupakan koreksi atas penyelenggaraan otonomi daerah selama periode 1999-2004, meskipun ada daerah pemekaran baru yang berhasil, rupanya lebih banyak daerah baru yang kurang berhasil. Sementara dalam praktek ketatanegaraan ide Pemekaran Wilayah, pada dasarnya merupakan respon dari perubahan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia pasca reformasi.

Salah satu masalah yang nampaknya cenderung terbengkalai dalam

<sup>1</sup> Dosen Tetap Prodi Ilmu Administrasi Negara Fisip Unihaz Bengkulu

mempertimbangkan masalah pemekaran adalah masalah ketahanan nasional. Empat pilar yang meliputi: Pancasila, UUD 1945, Bhennika Tunggal Ika dan NKRI yang bagi bangsa Indoensia telah menjadi harga final, harus menjadi rujukan utama dalam setiap pemekaran daerah baru ini.

Di atas segalanya pemekaran wilayah baru harus menjanjikan kesejahteraan bagi masyarakatnya dan bukan sebaliknya menciptakan keterbelakangan baru dan ketergantungan pendanaan yang membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN). Setiap pemekaran wilayah harus menjanjikan kemampuan untuk bersifat mandiri secara ekonomi dan memiliki semangat untuk melakukan keadilan distributif kepada para warga masyarakatnya.

Sejak tahun 2003 Provinsi Bengkulu mengalami pemekaran wilayah. Saat ini terdapat enam kabupaten baru (Daerah Otonom Baru, DOB) yang merupakan hasil pemekaran dari tiga kabupaten sebelumnya (Anonim, 2009), yaitu :

1. Kabupaten Mukomuko, pemekaran dari Kabupaten Bengkulu Utara,
2. Kabupaten Seluma, pemekaran dari Kabupaten Bengkulu Selatan,
3. Kabupaten Kaur, pemekaran dari Kabupaten Bengkulu Selatan,
4. Kabupaten Kepahiang, pemekaran dari Kabupaten Rejang Lebong,
5. Kabupaten Lebong, pemekaran dari Kabupaten Rejang Lebong, dan
6. Kabupaten Bengkulu Tengah, pemekaran dari Kabupaten Bengkulu Utara, pada 24 Juni 2008.

Kegiatan pemekaran wilayah-wilayah kabupaten ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam berbagai aspek. Konsekuensi dari pemekaran itu adalah terdapat Daerah Induk, DOB dan Daerah Mekar, dimana Daerah Mekar adalah gabungan antara Daerah Induk dan DOB. Pembentukan DOB dilakukan dalam rangka percepatan pertumbuhan ekonomi wilayah dalam kerangka pemberdayaan ekonomi berbasis potensi lokal. Sehingga dengan adanya pemekaran wilayah, aspek-aspek kehidupan masyarakat terutama aspek ekonomi diharapkan akan menjadi lebih baik dan merata.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penelitian ini dapat dirumuskan sebuah masalah berikut:

“Bagaimanakah dampak pemekaran

wilayah dalam perspektif otonomi daerah di kabupaten Bengkulu Tengah?”

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dampak pemekaran wilayah dalam perspektif otonomi daerah di kabupaten Bengkulu Tengah.

## B. Kajian Teoritis

### 1. Desentralisasi dan Otonomi Daerah

Pide, 1997 (dalam Joko Widodo, 2001: 39) mengemukakan bahwa desentralisasi merupakan pelimpahan atau penyerahan kekuasaan atau wewenang dibidang tertentu secara vertical dari suatu lembaga/ institusi/ pejabat yang lebih tinggi kepada garis fungsionaris dibawahnya sehingga yang disertai atau dilimpahi kekuasaan wewenang tertentu itu berhak bertindak atas nama sendiri dalam urusan tertentu.

Selanjutnya Rondinelli (1983: 69) mengemukakan, desentralisasi perlu dipilih dalam penyelenggaraan pemerintahan pembangunan, karena melalui desentralisasi akan dapat meningkatkan efektivitas dalam membuat kebijaksanaan nasional dengan cara mendelegasikan tanggungjawab yang lebih besar kepada para pejabat tingkat local untuk merancang proyek-proyek pembangunan, agar sesuai dengan kebutuhan dan kondisi setempat.

Sejalan dengan pemikiran diatas, Koesoemahatdja (1979) mengemukakan bahwa desentralisasi dalam arti ketatanegaraan merupakan pelimpahan kekuasaan pemerintahan dari pusat kepada daerah untuk mengurus rumah tangganya sendiri. Desentralisasi adalah sebuah sistem di dalam mewujudkan asas demokrasi, dimana memberikan kesempatan kepada rakyat untuk ikut serta dalam proses penyelenggaraan kekuasaan Negara yang dapat dibagi dalam 2 (dua) macam bentuk yaitu:

- a. Dekonsentrasi, yakni pelimpahan kekuasaan dari alat perlengkapan Negara tingkat lebih atas kepada bawahannya guna melancarkan pelaksanaan tugas pemerintahan; dan
- b. Desentralisasi, yakni ketatanegaraan atau desentralisasi politik yaitu pelimpahan kekuasaan perundang-undangan dan pemerintahan kepada daerah-daerah otonom dilingkungannya.

Dalam konteks diatas, rakyat dengan mempergunakan saluran-saluran tertentu (perwakilan) ikut serta dalam pemerintahan (partisipasi). Desentralisasi ketatanegaraan

terbagi kedalam 2 (dua) macam, yakni desentralisasi fungsional serta desentralisasi teritorial yang terdiri dari otonomi dan tugas pembantuan.

Secara terminologi, sudah cukup banyak para pakar memberikan uraian mengenai pengertian otonomi. Salah satunya adalah pendapat Logemann (Koswara, 2001: 59) yang memberikan pengertian konsep otonomi sebagai berikut: bahwa kebebasan bergerak yang diberikan kepada daerah otonom berarti member kesempatan kepadanya untuk menggunakan prakarsanya sendiri dari segala macam kekuasaannya dan untuk mengurus kepentingan publik. Kekuasaan bertindak merdeka yang diberikan kepada satuan-satuan kenegaraan yang memerintah sendiri daerahnya tersebut adalah kekuasaan yang berdasarkan inisiatif sendiri pemerintahan berdasarkan inisiatif sendiri.

Desentralisasi dan otonomi daerah dianggap dapat memberikan jawaban atas tuntutan pemerataan yang selama ini diinginkan oleh masyarakat local mengenai pembangunan sosial ekonomi, penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan politik yang efektif. Dalam konteks ini, persoalan desentralisasi dan otonomi berkaitan dengan erat dengan permasalahan pemberdayaan dalam artian memberikan kekuasaan dan kewenangan kepada masyarakat daerah untuk berpartisipasi di dalam pengambilan keputusan akan kepentingan di daerahnya.

Isu otonomi daerah adalah isu sentral yang masih relevan dan actual setelah berlakunya undang-undang yang mengaturnya. Isu tersebut lebih menitikberatkan akan permasalahan kebijakan orde baru yang sangat sentralistik dengan dominannya pemerintah pusat dalam mengintervensi daerah. Sejalan dengan ini, Ryass Rasyid (1997: 8) mengemukakan paradigma pemerintahan dewasa ini berubah dengan pesat dan terdapat 5 (lima) pokok akan perubahan tersebut, diantaranya adalah:

- a. Sentralisasi ke desentralisasi di dalam perencanaan pembangunan
- b. Pemerintahan besar menuju pemerintahan kecil
- c. Peningkatan pajak kepada penuntunan pajak
- d. Privatisasi pelayanan, dan
- e. Terciptanya *social capital* ke *individual capital*

Pandangan diatas merupakan langkah di dalam mengantisipasi atau menyikapi akan

sebuah perubahan (globalisasi dan demokratisasi) yang melanda kawasan dunia, maka terhadap kekuatan tersebut bagi Negara yang terbentuk kesatuan maupun federal dapat menjawabnya sebagai wujud desentralisasi.

## 2. Prinsip Pemekaran Wilayah

Perkembangan wilayah biasanya merupakan wujud dari keinginan masyarakat di suatu daerah untuk tumbuh dan berkembang dari segi ekonomi, politik, sosial, budaya dan keamanan, dalam dimensi geografis. Berkembangnya suatu wilayah dapat dilihat dari rasio luas wilayah terbangun (*built-up area*) terhadap total luas wilayah. Kondisi ini dapat dilihat dari semakin rapatnya jaringan jalan, semakin meluasnya wilayah perkantoran dan perdagangan, semakin menyebarnya wilayah pemukiman dengan kepadatan penduduk yang tinggi serta terwujudnya secara signifikan terhadap peluang kerja yang di dapatkan masyarakatnya.

Berkembangnya wilayah administratif yang berbatasan dengan kota kota besar menjadi cikal bakal terbentuknya Daerah Otonom Baru (DOB) dari pemekaran daerah induknya. Semestinya, proses seperti inilah yang menjadi acuan dasar pemerintah pusat di dalam merekomendasikan hasil Daerah Otonom Baru (DOB) di Indonesia.

Sebuah daerah yang sudah layak menjadi daerah otonom, harus ditandai dengan memiliki potensi ekonomi yang memenuhi syarat bagi kehidupan warganya, untuk dapat tumbuh dan berkembang. Secara perlahan tapi pasti, tanpa menimbulkan beban keuangan negara, wilayah tersebut akan berkembang sesuai mekanisme pasar.

Menurut Anonim (2012) apapun alasannya, pemekaran daerah harus mengutamakan serta mengedepankan kesejahteraan rakyat. Alasan-alasan pemekaran wilayah adalah :

- a. Alasan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat.  
Hal ini dijadikan alasan utama karena adanya kendala geografis, infrastruktur dan sarana perhubungan yang minim.
- b. Alasan historis.  
Pemekaran suatu daerah dilakukan karena alasan sejarah, yaitu bahwa daerah hasil pemekaran memiliki nilai historis tertentu.
- c. Alasan kultural atau budaya (etnis).  
Pemekaran daerah terjadi karena menganggap adanya perbedaan budaya

antara daerah yang bersangkutan dengan daerah induknya.

- d. Alasan ekonomi.  
Pemekaran daerah diharapkan dapat mempercepat pembangunan di daerah.
- e. Alasan anggaran.  
Pemekaran daerah dilakukan untuk mendapatkan anggaran dari pemerintah. Sebagaimana diketahui daerah yang dimekarkan akan mendapatkan anggaran dari daerah induk selama 3 tahun dan mendapatkan dana dari pemerintah pusat (DAU dan DAK).
- f. Alasan keadilan.  
Pemekaran dijadikan alasan untuk mendapatkan keadilan. Artinya, pemekaran daerah diharapkan akan menciptakan keadilan dalam hal pengisian jabatan publik dan pemerataan pembangunan.

### 3. Dampak Pemekaran Wilayah terhadap Pembangunan yang Keberlanjutan di Daerah

Rumusan dari regulasi yang ada selama ini memiliki tujuan yang baik bagi kesejahteraan masyarakat, dimana kebijakan pemekaran daerah telah banyak dituangkan dalam berbagai kebijakan-kebijakan yang ada selama ini, baik dalam Undang-undang maupun Peraturan Pemerintah.

Khalid (2012) menyatakan bahwa pemekaran wilayah dapat berimplikasi pada segala aspek kehidupan. Dampak-dampak pemekaran wilayah meliputi hal-hal sebagai berikut:

- a. Dampak Sosio, Politik dan Kultural  
Dari dimensi sosial, politik dan kultural, bisa dikatakan bahwa pemekaran daerah mempunyai beberapa implikasi positif, seperti pengakuan sosial, politik dan kultural terhadap masyarakat daerah. Melalui kebijakan pemekaran, sebuah entitas masyarakat yang mempunyai sejarah kohesivitas dan kebesaran yang panjang, kemudian memperoleh pengakuan setelah dimekarkan sebagai daerah otonom baru. Pengakuan ini memberikan kontribusi positif terhadap kepuasan masyarakat, dukungan daerah terhadap pemerintah nasional, serta manajemen konflik antar kelompok atau golongan dalam masyarakat. Namun kebijakan pemekaran juga dapat memicu konflik antar masyarakat, antar pemerintah daerah yang pada gilirannya juga menimbulkan masalah konflik horisontal dalam masyarakat. Sengketa

antara pemerintah daerah induk dengan pemerintah daerah pemekaran dalam hal pengalihan aset dan batas wilayah, juga sering berimplikasi pada ketegangan antar masyarakat dan antara masyarakat dengan pemerintah daerah.

- b. Dampak pada Pelayanan Publik  
Dari dimensi pelayanan publik, pemekaran daerah memperpendek jarak geografis antara pemukiman penduduk dengan sentra pelayanan, terutama ibukota pemerintahan daerah. Pemekaran juga mempersempit rentang kendali antara pemerintah daerah dengan unit pemerintahan di bawahnya. Pemekaran juga memungkinkan untuk menghadirkan jenis-jenis pelayanan baru, seperti pelayanan listrik, telepon, serta fasilitas urban lainnya, terutama di wilayah ibukota daerah pemekaran. Namun pemekaran juga dapat menimbulkan implikasi negatif bagi pelayanan publik, terutama pada skala nasional, terkait dengan alokasi anggaran untuk pelayanan publik yang berkurang. Hal ini disebabkan adanya kebutuhan belanja aparat dan infrastruktur pemerintahan lainnya yang bertambah dalam jumlah yang signifikan sejalan dengan pembentukan DPRD dan birokrasi di daerah hasil pemekaran. Namun, kalau dilihat dari kepentingan daerah semata, pemekaran bisa jadi tetap menguntungkan, karena daerah hasil pemekaran akan memperoleh alokasi DAU dalam posisinya sebagai daerah otonom baru.
- c. Dampak bagi Pembangunan Ekonomi  
Pasca terbentuknya Daerah Otonomi Baru (DOB) terdapat peluang yang besar bagi akselerasi pembangunan ekonomi di wilayah yang baru diberi status sebagai daerah otonom dengan pemerintahan sendiri. Bukan hanya infrastruktur pemerintahan yang terbangun, tetapi juga infrastruktur fisik yang menyertainya, seperti infrastruktur jalan, transportasi, komunikasi dan sejenisnya. Selain itu, kehadiran pemerintah daerah otonom baru juga memungkinkan lahirnya infrastruktur kebijakan pembangunan ekonomi yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah otonom baru. Semua infrastruktur ini membuka peluang yang lebih besar bagi wilayah hasil pemekaran untuk mengakselerasi pembangunan ekonomi.

Namun, kemungkinan akselerasi pembangunan ini harus dibayar dengan ongkos yang mahal, terutama anggaran yang dikeluarkan untuk membiayai pemerintahan daerah, seperti belanja pegawai dan belanja operasional pemerintahan daerah lainnya. Dari sisi teoritik, belanja ini bisa diminimalisir apabila akselerasi pembangunan ekonomi daerah bisa dilakukan tanpa menghadirkan pemerintah daerah otonom baru melalui kebijakan pemekaran daerah. Melalui kebijakan pembangunan ekonomi wilayah yang menjangkau seluruh wilayah, akselerasi pembangunan ekonomi tetap dimungkinkan untuk dilakukan dengan harga yang murah.

Namun, dalam perspektif masyarakat daerah, selama ini tidak ada bukti yang meyakinkan bahwa pemerintah nasional akan melakukannya tanpa kehadiran pemerintah daerah otonom.

- d. Dampak pada Pertahanan, Keamanan dan Integrasi Nasional
- Pembentukan DOB bagi beberapa masyarakat pedalaman dan masyarakat di wilayah perbatasan dengan negara lain, merupakan isu politik nasional yang penting. Bagi masyarakat tersebut, bisa jadi mereka tidak pernah melihat dan merasakan kehadiran 'Indonesia', baik dalam bentuk simbol pemerintahan, politisi, birokrasi dan bahkan kantor pemerintah. Bahkan, di beberapa daerah seperti di pedalaman Papua, kehadiran 'Indonesia' terutama ditandai dengan kehadiran tentara atas nama pengendalian terhadap gerakan separatis. Pemekaran daerah otonom, oleh karenanya, bisa memperbaiki penangan politik nasional di daerah melalui peningkatan dukungan terhadap pemerintah nasional dan menghadirkan pemerintah pada level yang lebih bawah. Akan tetapi, kehadiran pemerintahan DOB ini harus dibayar dengan ongkos ekonomi yang mahal, terutama dalam bentuk belanja aparat dan operasional lainnya. Selain itu, seringkali ongkos politiknya juga bisa sangat mahal, apabila pengelolaan politik selama proses dan pasca pemekaran tidak bisa dilakukan dengan baik. Sebagaimana terbukti pada beberapa daerah hasil pemekaran, ketidak mampuan untuk membangun inklusifitas politik antar

kelompok dalam masyarakat mengakibatkan munculnya tuntutan untuk memekarkan lagi daerah yang baru saja mekar. Untuk mempersiapkan upaya pemekaran ini, proses pemekaran unit pemerintahan terbawah, seperti desa untuk pemekaran kabupaten dan pemekaran kabupaten untuk mempersiapkan pemekaran provinsi, merupakan masalah baru yang perlu untuk diperhatikan.

#### 4. Hasil Studi Pemekaran di Indonesia

Secara umum terdapat perbedaan persepsi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pemerintah pusat, ketika merumuskan PP 129/2000 berkeinginan untuk mencari daerah otonom baru yang dapat berdiri sendiri dan mandiri. Di sisi lain, ternyata pemerintah daerah memiliki pendapat yang berbeda. Pemerintah daerah melihat pemekaran wilayah sebagai upaya untuk secara cepat keluar dari keterpurukan (David Jackson et.al., 2008 dalam Antonius Tarigan, 2010).

Beberapa alasan yang mendorong pemisahan diri suatu daerah atau pemekaran wilayah yaitu (Antonius Tarigan, 2010):

- a. *Preference for homogeneity* (kesamaan kelompok (SARA)) atau *historical ethnic* memungkinkan ikatan sosial dalam satu etnik yang sama perlu diwujudkan dalam satu wilayah yang sama pula.
- b. *Fiscal spoil* (insentif fiskal untuk memekarkan diri, dapat dari DAU/DAK), adanya jaminan dana transfer, khususnya Dana Alokasi Umum, dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah menghasilkan keyakinan bahwa daerah tersebut akan dibiayai.
- c. *Bureaucratic and political rent seeking* (alasan politik, dan untuk mencari jabatan penting/mobilitas vertikal). Alasan politik dimana dengan adanya wilayah baru akan memunculkan wilayah kekuasaan politik baru sehingga aspirasi politik masyarakat jauh lebih dekat. Pada level daerah tentu saja kesempatan tersebut akan muncul melalui kekuasaan eksekutif maupun legislatif.
- d. *Administratif dispersion, mengatasi rentang kendali pemerintahan*. Alasan ini semakin kuat mengingat daerah-daerah pemekaran merupakan daerah yang cukup luas

sementara pusat pemerintahan dan pelayanan masyarakat sulit di jangkau.

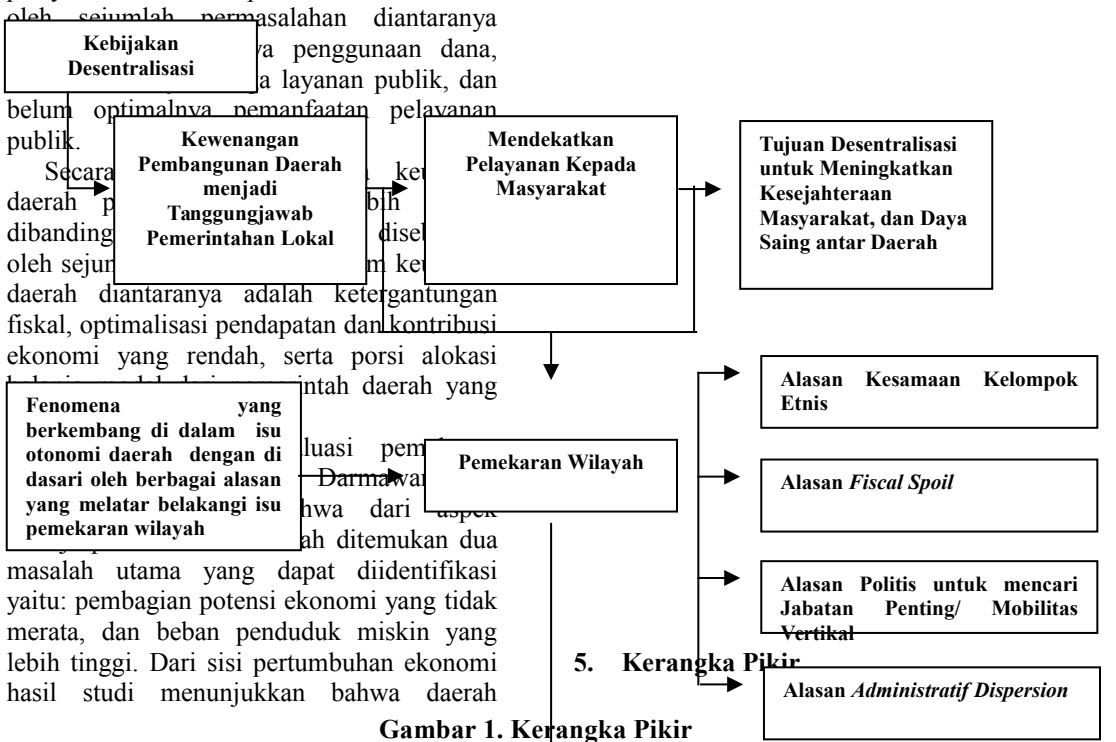
Berdasarkan hasil penelitian terdahulu mengenai dampak pemekaran wilayah yang dilakukan oleh BRIDGE Bappenas bekerjasama dengan UNDP, yang mana kajian dilakukan untuk mengevaluasi kondisi umum pada saat sebelum pemekaran (tahun 1999), dan ternyata kondisi daerah pemekaran tidak jauh berbeda dengan daerah kontrol. Namun setelah terjadi pemekaran daerah pada periode 2001-2005, posisi daerah DOB jauh tertinggal dari daerah induk maupun daerah kontrol.

Pada aspek perekonomian, berdasarkan indikator yang telah diteliti, terdapat dua masalah utama yang dapat diidentifikasi menjadi faktor penyebab ketidakseimbangan perekonomian pada DOB yaitu pembagian potensi ekonomi tidak merata dan beban penduduk miskin lebih tinggi. Pada aspek pelayanan publik, belum optimalnya pelayanan di daerah pemekaran disebabkan oleh sejumlah permasalahan diantaranya belum optimalnya pemanfaatan pelayanan publik.

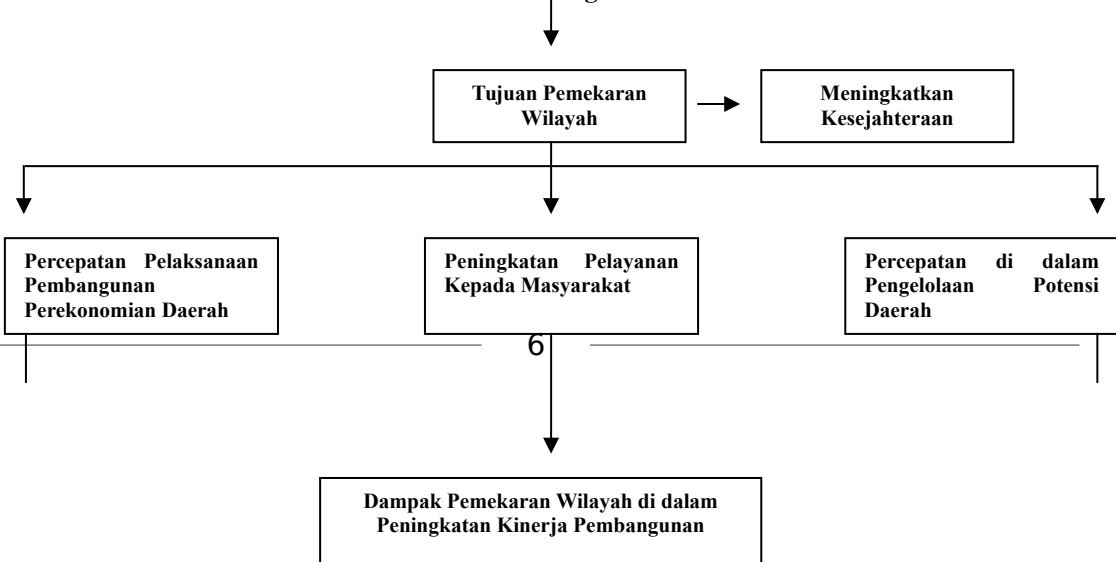
Secara daerah p dibanding oleh sejur daerah diantaranya adalah ketergantungan fiskal, optimalisasi pendapatan dan kontribusi ekonomi yang rendah, serta porsi alokasi intah daerah yang luasi pem Darmawah bahwa dari aspek ah ditemukan dua masalah utama yang dapat diidentifikasi yaitu: pembagian potensi ekonomi yang tidak merata, dan beban penduduk miskin yang lebih tinggi. Dari sisi pertumbuhan ekonomi hasil studi menunjukkan bahwa daerah

otonom baru lebih fluktuatif dibandingkan daerah induk yang relatif stabil dan meningkat. Diketahui bahwa daerah pemekaran telah melakukan upaya perbaikan kinerja perekonomian, namun karena masa transisi membutuhkan proses, maka belum semua potensi ekonomi dapat digerakkan.

Adapun dari sisi pengentasan kemiskinan, peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerah DOB belum dapat mengejar ketertinggalan Daerah Induk meskipun kesejahteraan DOB telah relatif sama dengan daerah-daerah kabupaten lainnya. Dari sisi ekonomi, ketertinggalan DOB terhadap Daerah Induk maupun daerah lainnya pada umumnya disebabkan keterbatasan sumber daya alam dan sumber daya manusia yang tersedia, selain dukungan pemerintah yang belum maksimal dalam mendukung Bergeraknya perekonomian melalui investasi publik.



Gambar 1. Kerangka Pikir



---

### **C. Metode Penelitian**

#### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, dimana sifat penelitian ini masih mencari-cari atau merupakan suatu langkah awal dari penjajakan secara mendalam terhadap fenomena yang dihadapi (Puji Purnomo, 1994).

Berdasarkan penjelasan diatas mengenai jenis penelitian ini, maka penelitian yang melekat akan pendekatan pada studi kebijakan ini dengan cara mengikuti alur logika induktif.

Sehubungan dengan logika berpikir induktif seperti yang telah dijelaskan diatas, maka penelitian ini sangat relevan dengan pendekatan kualitatif (Singarimbun dan Effendi, 1995: 3)

#### **2. Lokasi Penelitian**

Pemilihan lokasi penelitian ini di Kabupaten Bengkulu Tengah, karena kabupaten tersebut merupakan kabupaten termuda yang baru di mekarkan pada

kabupaten induknya yaitu Kabupaten Bengkulu Utara. Hal yang menarik untuk diteliti di lokasi ini adalah dengan terdapatnya kemudahan akses peneliti untuk mendapatkan data dan informasi yang masih sangat hangat mengenai proses keberlangsungannya pemekaran wilayah di Kabupaten Bengkulu Tengah.

#### **3. Teknik Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data menggunakan data sekunder berupa studi dokumnetasi yang bersumber dari data BPS berupa buku saku Kabupaten Bengkulu Tengah dalam Angka dari tahun 2012-2014 untuk mendapatkan data akurat dari kurun waktu 2011-2013. Data statistik yang di dapat untuk mengetahui hal yang mengenai perkembangan Kabupaten Bengkulu Tengah dari aspek ekonomi, pelayanan publik serta keuangan daerah.

Selain itu pula dilakukannya wawancara untuk mengetahui gambaran mengenai upaya yang dilakukan pemerintah daerah

Kabupaten Bengkulu Tengah dalam pembangunan daerah.

#### 4. Teknik Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis deskriptif, dimana analisis yang dilakukan untuk dapat menjelaskan kondisi perkembangan yang terjadi di Kabupaten Bengkulu Tengah berdasarkan aspek-aspek yang telah ditentukan.

Selanjutnya data dikelompokkan agar lebih mudah dalam menyaring mana data yang dibutuhkan dan mana yang tidak. Setelah dikelompokkan, data tersebut penulis jabarkan dengan bentuk teks agar lebih dimengerti. Setelah itu, penulis menarik kesimpulan dari data tersebut, sehingga dapat menjawab pokok masalah penelitian. Untuk menganalisa berbagai fenomena di lapangan, langkah-langkah yang dilakukan adalah:

- a. Pengumpulan informasi melalui wawancara, observasi langsung dan dokumentasi;
- b. Reduksi data. merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, transformasi data kasar yang muncul dari catatan lapangan. Langkah ini bertujuan untuk memilih informasi mana yang sesuai dan tidak sesuai dengan masalah penelitian.

- c. Penyajian data, setelah data direduksi, langkah analisis selanjutnya adalah penyajian (display) data. Penyajian data diarahkan agar data hasil reduksi terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan, sehingga makin mudah dipahami. Penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian naratif. Pada langkah ini, peneliti berusaha menyusun data yang relevan, sehingga menjadi informasi yang dapat disimpulkan dan memiliki makna tertentu. Prosesnya dapat dilakukan dengan cara menampilkan dan membuat hubungan antar fenomena untuk memaknai apa yang sebenarnya terjadi dan apa yang perlu ditindaklanjuti untuk mencapai tujuan penelitian. Display data yang baik merupakan satu langkah penting menuju tercapainya analisis kualitatif yang valid dan handal.
- d. Tahap akhir adalah menarik kesimpulan yang dilakukan secara cermat dengan melakukan verifikasi berupa tinjauan ulang pada catatan-catatan lapangan, sehingga data-data yang ada teruji validitasnya (Sugiono: 2005).

Adapun komponen analisis dampak pemekaran wilayah terhadap kinerja pembangunan di Kabupaten Bengkulu Tengah dapat dijabarkan berdasarkan uraian pada table berikut:

**Tabel 1. Komponen Analisis Dampak Pemekaran Wilayah terhadap kinerja pembangunan di Kabupaten Bengkulu Tengah**

No	Atribut	Komponen
<b>Dampak Pemekaran Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah di Kabupaten Bengkulu Tengah</b>		
1.	Pertumbuhan Ekonomi Daerah	a. Peningkatan laju pertumbuhan ekonomi daerah
		b. Peningkatan pendapatan per-kapita
<b>Dampak Pemekaran Terhadap Kondisi Pelayanan Publik di Kabupaten Bengkulu Tengah</b>		
1.	Pelayanan Pendidikan	a. Tingkat pelayanan sarana pendidikan
		b. Tingkat pelayanan tenaga pendidik
2.	Pelayanan Kesehatan	a. Tingkat pelayanan sarana kesehatan
		b. Tingkat pelayanan tenaga medis
<b>Dampak Pemekaran Terhadap Kinerja Keuangan Daerah di Kabupaten Bengkulu Tengah</b>		
1.	Penerimaan	a. PAD
		b. Tingkat kemandirian
2.	Belanja	a. Alokasi belanja

#### 5. Validitas Data

Untuk menjamin validitas data, penelitian ini menggunakan 2 jenis triangulasi, yaitu triangulasi data dan triangulasi sumber. Dalam penelitian ini peneliti melakukan "cross check" terhadap

data yang dikumpulkan dari sumber yang berbeda, yaitu informan, catatan lapang dan dokumen. Selain itu, peneliti juga menggunakan metode yang berbeda seperti *indpeth-interview*. Dengan demikian validitas data diharapkan bisa terjamin.



#### D. Hasil Analisis

##### 1. Pertumbuhan Ekonomi Daerah di Kabupaten Bengkulu Tengah

Pertumbuhan sebuah ekonomi daerah merupakan salah satu indikator yang sangat penting di dalam melakukan analisis terhadap pembangunan ekonomi yang terjadi pada suatu wilayah. Pertumbuhan ekonomi menunjukkan sejauh mana aktivitas perekonomian akan menghasilkan tambahan pendapatan masyarakat pada periode tertentu. Oleh karenanya, aktivitas perekonomian adalah suatu proses penggunaan factor produksi untuk menghasilkan output, maka proses ini pada gilirannya akan menghasilkan balas jasa terhadap factor produksi yang dimiliki oleh masyarakat.

Untuk menghitung tingkat pertumbuhan ekonomi, data PDRB yang digunakan adalah data PDRB atas dasar harga konstan 2000. Dengan menggunakan data atas dasar harga konstan, maka pertumbuhan PDRB semata-mata hanya mencerminkan pertumbuhan output yang dihasilkan perekonomian pada periode tertentu. Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bengkulu Tengah sejak tahun 2011 sebesar 6,13 persen.

PDRB pada dasarnya merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu wilayah tertentu atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi. PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada setiap tahun. PDRB atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa tersebut yang dihitung menggunakan harga berlaku pada satu tahun tertentu sebagai dasar. Dalam publikasi ini tahun dasar yang digunakan adalah tahun 2000, hal ini tentu mencerminkan struktur ekonomi terkini.

Sektor pertanian memiliki peranan yang cukup besar dalam perekonomian Kabupaten Bengkulu Tengah. Agar sektor pertanian dapat menjadi kekuatan perekonomian, perlu dilakukan revitalisasi sehingga mampu menciptakan lapangan kerja dan usaha bagi penduduk pedesaan, meningkatkan pendapatan melalui peningkatan produktivitas dan nilai tambah serta untuk mengurangi kemiskinan. Revitalisasi pertanian dapat dilakukan antara lain melalui reformasi agraria sehingga memiliki langkah-langkah mendasar yang kuat dan bervisi jangka panjang.

Sektor pertambangan dan penggalian pada tahun 2011 tumbuh 7,52 persen. Sektor tersebut memiliki potensi yang cukup besar untuk dikembangkan, namun sampai saat ini pelayatannya masih belum optimal karena belum banyak investor dalam dan luar negeri menanamkan modalnya di Kabupaten Bengkulu Tengah. Dalam bidang ekonomi, pembangunan berbasis sumberdaya alam seperti pada sektor pertambangan dan penggalian apabila dikelola secara optimal, akan mampu menghasilkan keunggulan kompetitif berupa devisa dari ekspor ke luar negeri.

Sektor industri pengolahan pada tahun 2011 tumbuh 1,39 persen, sektor listrik gas dan air tumbuh 3,91 persen, sektor bangunan tumbuh 5,33 persen, sektor perdagangan, hotel dan restoran tumbuh 5,94 persen, sektor pengangkutan dan komunikasi tumbuh 9,69 persen, sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan tumbuh 8,43 persen yang diikuti oleh pertumbuhan sektor jasa-jasa sebesar 7,63 persen. Kenyataan menunjukkan bahwa distribusi sumberdaya alam dan tenaga kerja antar wilayah masih sangat bervariasi. Fenomena tersebut indikasinya terlihat pada perbedaan laju pertumbuhan antar sektor dalam kehidupan ekonomi masyarakat Bengkulu Tengah.

Salah satu faktor yang mempengaruhi laju pertumbuhan ekonomi suatu wilayah yaitu tingkat investasi di wilayah tersebut. Penentuan arah investasi dalam proses produksi untuk meningkatkan kegiatan ekonomi baik yang dilakukan oleh publik maupun swasta, pada umumnya dihadapkan pada masalah apa (*what*), bagaimana (*how*), di mana (*where*) dan kepada siapa (*to whom*) suatu kegiatan produksi harus dijalankan agar tercapai efisiensi yang optimal.

Upaya peningkatan investasi dapat dilakukan dengan mengurangi hambatan-hambatan terhadap investasi seperti penyederhanaan perizinan, mengurangi tumpang tindih kebijakan antara pusat, daerah dan antar sektor-sektor serta penyediaan infrastruktur.

Partisipasi masyarakat Bengkulu Tengah dalam pembangunan ekonomi cukup tinggi, namun karena keterbatasan kemampuan dan ketrampilan serta perilaku ekonomi masyarakat yang belum mampu menggerakkan roda perekonomian sesuai dengan tuntutan, sehingga PDRB per kapita masing-masing penduduk relatif rendah. Pelaku ekonomi di daerah ini pada

umumnya memiliki profil usaha kecil dan menengah, manajemen tradisional, orientasi kedalam, penggunaan teknologi sederhana, bergerak di sektor riil dan masih berorientasi pada penanganan proyek-proyek pemerintah.

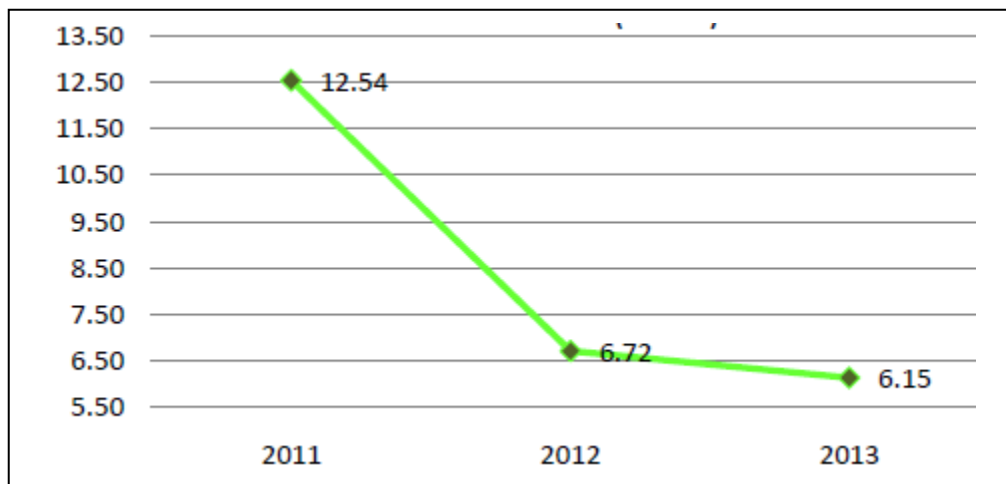
Kebijakan dan program pembangunan ekonomi Kabupaten Bengkulu Tengah perlu diarahkan pada peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Sasaran dan kebijakan tersebut adalah untuk meningkatkan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi, tersedianya kebutuhan akan pangan masyarakat, tumbuh dan berkembangnya usaha kecil, menengah dan koperasi, tersedianya sumberdaya manusia yang berkualitas, meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan investasi swasta dalam berbagai sektor ekonomi.

Perekonomian Kabupaten Bengkulu Tengah pada kuartal tahun 2013 masih di

dominasi oleh sektor pertanian yaitu sebesar 34,37 persen. Sektor pertanian ini tidak hanya berupa pertanian tanaman pangan, namun juga mencakup hal yang lain seperti tanaman perkebunan, perikanan, peternakan dan juga kehutanan. Namun kontribusi sektor pertanian mengalami penurunan dari tahun sebelumnya, meskipun tidak signifikan pada tahun 2012 sektor pertanian menyumbang 34,64 persen.

Perekonomian Bengkulu Tengah Tahun 2013 tumbuh sebesar 6,15 persen. Perekonomian Kabupaten Bengkulu Tengah mengalami perlambatan dari tahun sebelumnya seiring perlambatan pertumbuhan ekonomi nasional, dimana grafik laju pertumbuhan PDRB Kabupaten Bengkulu Tahun 2011-2013 dapat dilihat sebagai berikut:

**Grafik 1. Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Bengkulu Tengah atas dasar Harga Konstan menurut Lapangan Usaha Tahun 2011-2013 (persen)**



Sumber: Data BPS, 2014

## 2. Kondisi Pelayanan Publik di Kabupaten Bengkulu Tengah

Bidang pelayanan yang menjadi fokus di dalam penelitian ini adalah mengenai pelayanan dasar bagi masyarakat yang harus disediakan oleh pemerintah, yaitu pendidikan dan kesehatan. Dimana keduanya merupakan kebutuhan dasar bagi setiap penduduk yang menjadi salah satu ukuran kesejahteraan masyarakat.

Hingga akhir tahun 2013, di Kabupaten Bengkulu Tengah terdapat 109 Taman Kanak-kanak dengan 1.934 murid dan 420 orang guru. Kecamatan Pagar Jati dan Pematang Tiga masing-masing hanya

memiliki 2 TK, sedangkan Pondok Kelapa telah memiliki cukup banyak TK, yaitu 31 TK. Jika dilihat rasio guru dan murid, rata-rata guru TK di Bengkulu Tengah mengajar 4 orang murid. Terdapat 91 SD Negeri yang tersebar di seluruh kecamatan di Kabupaten Bengkulu Tengah. Jumlah murid SD di Kabupaten Bengkulu Tengah adalah 10.829 yang diasuh oleh 736 guru. Satu orang guru rata-rata mengajar 14 orang murid.

Pendidikan 9 tahun mengharuskan penduduk menempuh pendidikan minimal sampai dengan tingkat SLTP. Di Kabupaten Bengkulu Tengah terdapat 32 SLTP. Setiap kecamatan telah memiliki setidaknya 2

SLTP guna memudahkan penduduk usia 12-15 tahun menuntaskan wajib belajar 9 tahun. 4.792 murid telah tercatat sebagai siswa SLTP di Bengkulu Tengah. Berkurang 45 persen dari jumlah murid tahun sebelumnya yang berjumlah 4681. Murid-murid ini diasuh oleh 439 orang guru. Rasio murid-guru SLTP di Kabupaten Bengkulu Tengah adalah sebesar 10,92. Pada jenjang yang lebih tinggi, yaitu SLTA, Kabupaten Bengkulu Tengah memiliki 8 sekolah negeri dengan 2.885 murid dan 230 orang guru. Jumlah murid bertambah 28,97 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Selain SLTA, Sekolah Menengah Kejuruan juga menjadi pilihan melanjutkan pendidikan setelah SLTP. Terdapat 2 SMK di Kabupaten Bengkulu Tengah, yaitu di Kecamatan Pondok Kelapa dan Kecamatan Pematang Tiga. Tahun 2013 jumlah siswa yang bersekolah di SMK adalah 245 orang, dengan 40 orang guru yang mengajar.

Pelayanan pendidikan yang diukur diatas melalui tingkat pelayanan sekolah terhadap murid dan tingkat pelayanan guru terhadap murid. Setelah membentuk daerah otonom, Kabupaten Bengkulu Tengah telah memberikan perhatian yang cukup besar pada sektor pendidikan, hal ini sesuai dengan Motto Pembangunan Kabupaten Bengkulu Tengah yang berbunyi “*Maroba Kite Maju*” (Marilah Kita Maju), Menuju Kabupaten Bengkulu Tengah R A M I (Rapi, Aman, Makmur, dan Indah).

Sedangkan urusan kesehatan di Kabupaten Bengkulu Tengah telah berdiri sebuah Rumah Sakit Umum Daerah tipe D sebagai fasilitas pengobatan bagi masyarakat Bengkulu Tengah. di setiap kecamatan telah berdiri Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang berlokasi di ibukota kecamatan.

Hingga tahun 2013, jumlah puskesmas di Bengkulu Tengah adalah 20 buah. Guna menunjang dan membantu memperluas jangkauan dalam ruang lingkup wilayah yang lebih kecil didirikan 27 Pustu (Puskesmas Pembantu). Pustu berfungsi untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang dilakukan Puskesmas dalam ruang lingkup wilayah yang lebih kecil. Tidak semua masyarakat di Bengkulu Tengah bisa menjangkau lokasi puskesmas/pustu dengan mudah, mengingat sarana transportasi yang

belum memadai. Oleh sebab itu diadakan 19 puskesmas keliling dengan sistem jemput bola atau mendatangi pasien di desa/kelurahan secara berkala.

Jumlah tenaga medis di Kabupaten Bengkulu Tengah masih sangat minim, belum ada dokter spesialis yang berpraktek. Ada sebanyak 26 dokter tersebar di seluruh kecamatan di Bengkulu Tengah. Perawat yang bekerja di Kabupaten Bengkulu Tengah sebanyak 287 orang, terdiri dari 86 orang perawat umum, 5 orang perawat gigi dan 196 orang bidan.

Kekurangan tenaga kesehatan ini membuat masyarakat memanfaatkan pengobatan alternatif. Untuk menolong proses persalinan, di Bengkulu Tengah terdapat 42 orang dukun bayi terlatih dan 108 orang dukun yang belum terlatih. Berikut diuraikan banyaknya Dokter, Perawat dan Bidan menurut sebaran kecamatan di Kabupaten Bengkulu Tengah tahun 2013.

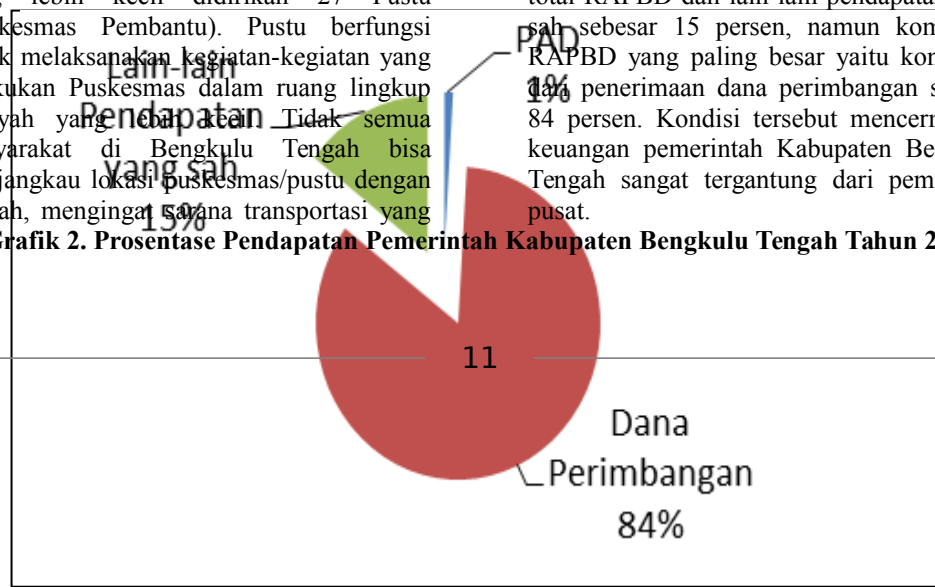
### 3. Kinerja Keuangan Daerah di Kabupaten Bengkulu Tengah

Kinerja keuangan pemerintah daerah yang akan di analisis di dalam penelitian ini, mencakup komposisi APBD, baik penerimaan maupun alokasi belanja. Analisis mengenai penerimaan daerah menggambarkan sejauh mana penerimaan daerah dapat mengoptimalkan potensi yang dimilikinya, agar dapat menjadi kontribusi yang berharga bagi daerah tersebut.

Adapun analisis belanja menggambarkan bagaimana pemerintah daerah Kabupaten Bengkulu Tengah dalam melakukan alokasi sumber daya untuk aktivitas/ menunjang kinerja pembangunan daerahnya.

Apabila melihat realisasi penerimaan/ pengeluaran dalam anggaran penerimaan dan belanja daerah Kabupaten Bengkulu Tengah sebesar Rp. 439.343.123.428, dimana dalam RAPBD Kabupaten Bengkulu Tengah tahun 2011, Pendapatan Asli Daerah (PAD) hanya menyumbang 1 persen dari total RAPBD dan lain-lain pendapatan yang sah sebesar 15 persen, namun komponen RAPBD yang paling besar yaitu kontribusi penerimaan dana perimbangan sebesar 84 persen. Kondisi tersebut mencerminkan keuangan pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah sangat tergantung dari pemerintah pusat.

Grafik 2. Prosentase Pendapatan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2011

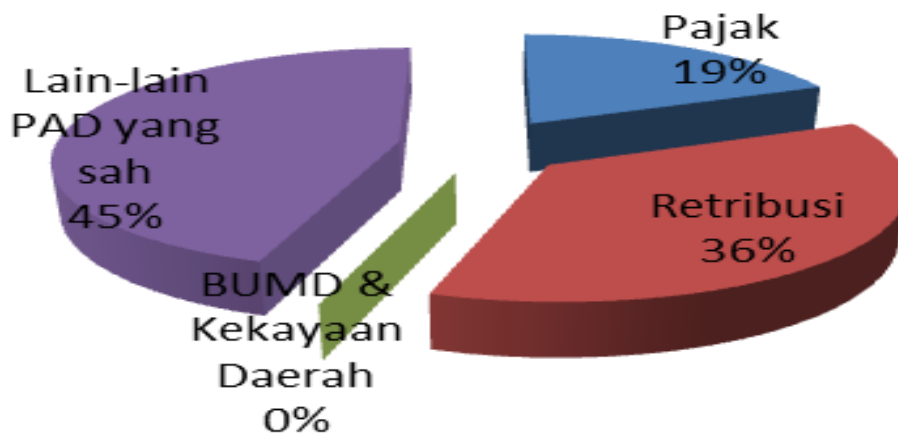


Sumber: Kabupaten Bengkulu Tengah dalam Angka, Tahun 2012.

Dari data diatas, maka dapat dijelaskan bahwasannya penyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang paling besar adalah pendapatan lain-lain yang sah, yaitu 45 persen, kemudian retribusi sebesar 36 persen dan pajak daerah 19 persen. Pada tahun 2011

Kabupaten Bengkulu Tengah belum memiliki Badan Usaha Miliik Daerah dan pengelolaan hasil alam sendiri, sehingga tidak memiliki penerimaan dari keuntungan BUMD dan pengelolaan kekayaan alamnya.

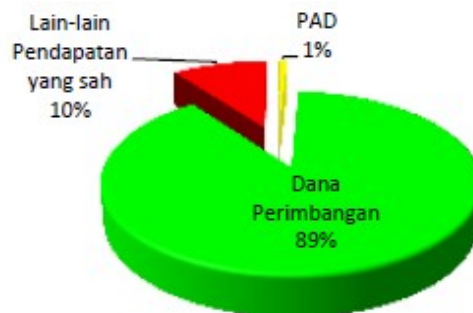
**Grafik 3. Prosentase Sumber PAD Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2011**



Realisasi penerimaan dalam Anggaran Penerimaan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah tahun 2012 sebesar 404 miliar rupiah. Sedangkan pengeluaran sebesar 407,5 miliar rupiah atau mengalami defisit anggaran sebesar 3,5 miliar rupiah. Dalam RAPBD Kabupaten Bengkulu Tengah tahun 2012, Pendapatan Asli Daerah masih sebesar 1 persen dari total RAPBD dan Lain-lain pendapatan yang sah sebesar 10 persen. Komponen RAPBD yang paling

besar kontribusinya adalah dana perimbangan yaitu sebesar 89 persen. Hal ini Kabupaten Bengkulu Tengah pada tahun 2012 knerja keuangannya masih tergantung pada aliran dana dari pemerintah pusat. Penyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang paling besar adalah pajak, yaitu 31 persen, kemudian lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sah 61 persen, retribusi 5 persen dan pendapatan BUMD 3 persen.

**Grafik 4. Proporsi Penerimaan Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2012 Menurut Sumber Penerimaan**



Sumber: Kabupaten Bengkulu Tengah dalam Angka 2013

Selanjutnya realisasi penerimaan dalam Anggaran Penerimaan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah di tahun 2013 sebesar Rp. 402.743.438.000,- dan penegeluarannya sebesar Rp. 406.344.204.000,- atau masih mengalami deficit seperti pada tahun sebelumnya sebesar Rp. 3.600.766.000,-. Dalam RAPBD tahun 2013 ini Kabupaten Bengkulu Tengah untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD) masih menyumbang 1 persen dari total RAPBD. Penyumbang PAD yang paling besar pada

tahun 2013 adalah pajak yang telah menyumbang sebesar 49 persen, lalu untuk lain-lain PAD yang sah sebesar 38 persen, retribusi 8 persen dan pendapatan BUMD naik dari tahun sebelumnya menjadi 5 persen.

Adapun proporsi untuk realisasi belanja pemerintah menurut jenis belanja dari tahun 2011-2013 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

**Tabel 2. Realisasi Belanja Pemerintah Menurut Jenis Belanja di Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2011-2013**

No	Jenis Belanja	Nilai (Rp. 000)		
		2011	2012	2013
1	Belanja Langsung	227.087.129,578	156.493.970	246.865.656,07
2	Belanja Tidak Langsung	211.186.514,041	209.867.741	232.024.060,96

Sumber: Data BPS yang Diolah

Secara umum alokasi belanja langsung relatif besar, sehingga kinerja keuangan Kabupaten Bengkulu Tengah untuk mendukung kinerja pembangunan telah berjalan dengan baik walau pada tahun 2012 mengalami penurunan lebih kecil dari Belanja Tidak Langsunnya.

Berdasarkan proporsi akan alokasi belanja daerah di Kabupaten Bengkulu Tengah dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat indikasi kalau pemerintah daerah terlalu banyak melakukan pengeluaran rutin yang sifatnya administratif.

Fenomena mengenai pemekaran daerah yang terjadi di Indonesia saat ini menunjukkan banyaknya pemerintah daerah yang mengalami kebangkrutan (*failed*) dikarenakan alokasi terhadap belanja rutinnya sangat besar dan tidak pada nilai-nilai yang produktif untuk sebuah pembangunan. Seringkali, pemekaran wilayah juga bukan menjadi alat untuk

tujuan pembangunan melainkan untuk tujuan-tujuan lainnya.

Simpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa hasil pemekaran daerah di Kabupaten Bengkulu Tengah benar-benar dimanfaatkan untuk tujuan pembangunan yang lebih baik, mengingat alokasi yang besar digunakan untuk kepentingan pembangunan daerah.

#### E. Pembahasan

Logika di dalam penetapan kriteria pemekaran wilayah telah seharusnya berkaitan akan besaran populasi dengan beban urusan, basis pajak, serta angka prospek ekonomi yang menonjol. Selama ini pendekatan akan materi pemekaran daerah telah diatur di dalam Peraturan Pemerintah No. 129 tahun 2000 yang lebih berorientasi kepada pembentukan daerah baru dengan jangkauan pengumpulan datanya yang terlalu luas, sehingga pada akhirnya

Peraturan Pemerintah ini seringkali gagal untuk memberikan pendekatan teknis dan politik yang sesuai untuk dapat menghadapi berbagai usulan.

Adapun dampak dari pemekaran wilayah di Kabupaten Bengkulu Tengah telah berkesesuaian dengan tujuan pemekaran, yaitu dalam hal pembangunan yang tercantum pada PP No. 129 Tahun 2000 Tentang Persyaratan Pembentukan Dan Kriteria Pemekaran, Penghapusan, Dan Penggabungan Daerah yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan melalui: peningkatan pelayanan kepada masyarakat, percepatan pelaksanaan pembangunan perekonomian daerah, dan peningkatan kinerja keuangan daerah sebagai salah satu bentuk dari percepatan pengelolaan potensi daerah.

Adapun untuk tujuan lain yang juga tercantum dalam peraturan ini, yaitu percepatan pertumbuhan kehidupan demokrasi, peningkatan keamanan dan ketertiban, dan untuk peningkatan hubungan yang selaras antar Pemerintah Pusat dan Daerah tidak menjadi fokus dalam penelitian ini. Selain itu, pemekaran Kabupaten Bengkulu Tengah juga dinilai sesuai dengan beberapa tujuan desentralisasi berdasarkan Cheema and Rondinelli (2007), yang dapat disimpulkan untuk:

- a. Sebagai upaya untuk penyediaan pelayanan publik yang lebih efisien dan memperluas jangkauan pelayanan dengan memberikan tanggung jawab kepada pemerintah daerah;
- b. Untuk mempercepat pembangunan dan membuka kebuntuan birokrasi yang timbul dari perencanaan dan manajemen dari model pemerintahan yang tersentralisasi; dan
- c. Untuk berpartisipasi lebih aktif dalam perekonomian global.

Dampak positif yang dicapai oleh Kabupaten Bengkulu Tengah pasca pemekaran ditunjang potensi daerah yang cukup besar. Dimana peran Kabupaten Bengkulu Tengah sebagai salah satu wilayah perlintasan yang menghubungkan antar kabupaten dan kota yang memberikan daya tarik tersendiri sebagai pengembangan wilayah aglomerasi di Provinsi Bengkulu.

#### **F. Penutup**

Berdasarkan hasil penelitian, dapat diketahui bahwa pada pertumbuhan

ekonomi, terjadi pertumbuhan yang belum terlalu signifikan pada Kabupaten Bengkulu Tengah sebagai daerah otonom, sehingga dampak pemekaran yang terjadi belum dapat diukur dengan pasti. Hal ini juga mengingat pemekaran yang resmi terjadi baru berlangsung hampir selama 6 tahun.

Sedangkan untuk pelayanan publik, pasca pemekaran wilayah Kabupaten Bengkulu Tengah mengalami peningkatan pelayanan publik yang cukup pesat. Perhatian pemerintah terhadap pelayanan publik ini pun juga besar. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa dampak pemekaran wilayah Kabupaten Bengkulu Tengah terhadap penyediaan pelayanan publik dinilai baik bagi DOB maupun kabupaten induk.

Kinerja keuangan Kabupaten Bengkulu Tengah pasca pemekaran juga sangat baik, hal ini dilihat dari pengelolaan penerimaan maupun belanja. Penerimaan daerah yang meningkat sangat pesat menunjukkan efektifitas kinerja keuangan daerah dalam mengelola potensi yang dimilikinya sangat baik. Sebelum pemekaran, PAD yang dapat digali dari daerah yang akhirnya memisahkan diri dan membentuk Kabupaten Bengkulu Tengah ini tidak sebesar ketika dikelola secara mandiri oleh Kabupaten Bengkulu Utara, maka secara menyeluruh, dapat disimpulkan bahwa pemekaran wilayah Kabupaten Bengkulu Tengah dinilai berhasil.

Melihat dari simpulan diatas, maka perlu kiranya sebuah rekomendasi di dalam penelitian ini, untuk disampaikan kepada seluruh pihak yang konsren dan bertanggung jawab terhadap pemekaran daerah, dengan poin-poin penting berikut:

- a. Untuk kebijakan pemekaran di masa yang akan datang, perlu dikaji dengan lebih mendalam mengenai potensi daerah. Pembangunan potensi untuk daerah yang akan memekarkan diri harus seimbang dan merata. Hal ini menjadi salah satu kunci keberhasilan dan kemajuan dari daerah yang akan mekar.
- b. Sedangkan untuk daerah yang relatif masih kurang berkembang, dirasa bahwa pemekaran bukanlah solusi yang baik mengingat ketimpangan yang akan ditimbulkan akan semakin besar.
- c. Dengan melihat perkembangan yang sangat baik, dan rencana pembangunannya ke arah hasil

pertanian dan pertambangan yang dapat meningkatkan arah pembangunan yang berorientasi pada perdagangan dan jasa, maka diprediksikan Kabupaten Bengkulu Tengah kedepannya dapat membentuk pusat kegiatan baru di pinggiran Kota Bengkulu, yang mana sebagai ibukota dari Provinsi Bengkulu.

#### DAFTAR PUSTAKA

##### Buku Bacaan

- Arianti, NN dan Cahyadinata, Indra. 2013. *Kajian Dampak Pemekaran Wilayah Terhadap Kinerja dan Pemerataan Ekonomi Daerah Pesisir di Provinsi Bengkulu*. Laporan Akhir Kegiatan Penelitian. Bengkulu: Fakultas Pertanian Unib.
- Cheema, S. G., & Rondinelli, D. A. 1983. *Implementing Decentralization Policies An Introduction. In Decentralization and Development : Policy Implementation in Developing Countries*. Beverly Hills, California: Sage Publication.
- Joko Widodo. 2001. *Good Governance*. Surabaya: Insan Cendekia.
- Koesoemahatmadja, Mochtar. 1979. *Pengantar Ke Sistem Pemerintah Daerah Di Indonesia*, Bandung: Bina Cipta.
- Koswara, E. 2001. *Otonomi Daerah Untuk Demokrasi dan Kamandirian Rakyat*. Jakarta: Yayasan PARIBA.
- Moleong, Lexy. 2000. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Nawawi, Hadari. 1992. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: UGM Press.
- Puji, Purnomo. 1994. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bina Aksara.
- Singarimbun, Masri dan Sofian Effendi. 1995. *Metode Penelitian Survey*. Jakarta: LP3ES.
- Rasyid, Ryass. 1998. *Desentralisasi dalam Rangka Menunjang Pembangunan Daerah dalam Pembangunan Administrasi Indonesia*. Jakarta: LP3ES.
- Tarigan Antonius. 2010. *Dampak Pemekaran Wilayah*. Majalah Perencanaan Pembangunan Edisi 01: 22-26.

##### Website:

- Anonim. 2012. *Enam Alasan Pemekaran/Pembentukan Daerah Otonom*. <http://phylopop.com>.
- Khalid, T. M. 2012. *Otonomi Daerah:*

*Tujuan Pemekaran dan Penggabungan Daerah*.

<http://tengkumahesakhalid.blogspot.com>.

Witrianto. 2013. *Profil Provinsi Bengkulu, Sejarah Pemerintahan*.

<http://bengkuluprov.go.id>.

[www.wikipedia.org](http://www.wikipedia.org)

##### Dokumen:

- Badan Pusat Statistik (BPS). 2012. *Kabupaten Bengkulu Tengah dalam Angka 2012*. Kerjasama Badan Pusat Statistik Kabupaten Bengkulu Tengah dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah.
- Badan Pusat Statistik (BPS). 2013. *Kabupaten Bengkulu Tengah dalam Angka 2013*
- Badan Pusat Statistik (BPS). 2014. *Kabupaten Bengkulu Tengah dalam Angka 2014*